Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN 1410-4946
Volume 10, Nomor 1, Juli 2006 (91 - 120)

Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia

*Eric Hiariej**

Abstract

State capitalism in Indonesia has been experiencing significant transformation as control over financial resources no longer attainable. The decreasing role of the state as investor none the less, does not necessarily means the loosing commitment to perform as regulator

Kata-kata kunci:
kapitalisme negara; peran negara; reformasi ekonomi; globalisasi financial; krisis kapitalisme

Pengantar

Pembangunan ekonomi yang kapitalistik, menurut cara pandang Marxis konvensional, bisa melalui dua jalan. Jalan pertama, yang dianggap ideal adalah jalan dari bawah ditempuh melalui proses pembebasan para borjuasi dari kungkungan kelas-kelas sosial dominan di pedesaan maupun di perkotan. Sedangkan jalan kedua, adalah model Prussia yang bersifat *top down*. Jalan ini ditempuh ketika tidak terdapat kelas pemilik modal yang cukup kuat yang memaksa negara mengambil alih peran utama dalam pembangunan dan industrialisasi. Perkembangan kapitalisme Indonesia pasca dekolonisasi lebih menyerupai model *dirigiste* negara ala Prussia. Sejak dekade 1950an,

* *Eric Hiariej* adalah dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM Yogyakarta dan PhD Candidate pada *Australian National University*, Canberra, Australia. Ia bisa dihubungi melalui e-mail: eric.hiariej@anu.edu.au

negara telah tampil sebagai faktor dominan dalam proses modernisasi ekonomi. Perusahan-perusahan negara, misalnya, tumbuh sebagai kekuatan penting dibalik perekonomian nasional. Seiring tampilnya Orde Barun negara terlibat aktif dalam membangun fasilitas publik, mengembangkan infrastruktur sosial, mempromosikan pendidikan, menyediakan basis legal bagi beroperasinya pasar dan secara langsung ikut mengakumulasi kapital. Sekalipun gelombang reformasi yang menerpa sejak 1998 berhasil memaksa, diantaranya, privatisasi, arti penting negara dalam pembangunan ekonomi tidak serta merta hilang begitu saja.

Boleh dibilang keterlibatan negara dalam pembangunan ekonomi Indonesia memiliki dua dimensi. Pertama, negara berperan aktif sebagai agen pembangunan itu sendiri. Negara membangun infrastruktur, menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan dan juga menyiapkan kerangka regulasi yang memadai bagi proses akumulasi kapital. Hanya saja berbeda dengan negara Jerman kuno, negara Indonesia. (Tornquist, 1990), tidak tergolong negara rasional yang bertindak efisien. Sebaliknya negara Indonesia adalah aktor yang arbiter dan tidak netral. Badannya menjadi semacam arena yang mudah dipenentrasi oleh individu dan kelompok non negara untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi masing-masing. Tak heran jika peran negara yang besar dalam perekonomian berjalin kelindan dengan beberapa bentuk penyelewenagan kekuasaan seperti korupsi yang merajalela. Tapi tampaknya pandangan Tornquist mengabaikan dinamika internal kapitalisme negara Indonesia itu sendiri. Terbukti dalam perkembangannya sekalipun negara Indonesia cenderung menjadi negara yang korup, ada saatnya negara berada dalam situasi yang memaksanya melakukan berbagai langkah pembaharuan untuk memberantas perilaku-perilaku ekonomi dan politik yang tidak rasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip efisiensi (Hiariej, 2003).

Kedua, negara juga secara sadar melindungi dan menghidupi kelas pemilik modal. Negara diantaranya menyediakan proyek pembangunan sebagai lahan kegiatan usaha, memberikan lisensi dan monopoli perdagangan, menggelontorkan kredit dan membuat kebijakan yang menguntungkan. Walau begitu negara kapitalis Indonesia tidak bisa dilihat sebagai komite kepentingan para pebisnis seperti yang dijelaskan teori negara instrumentalis. Sebaliknya negara tetap

memiliki otonomi relatif, memiliki keleluasaan untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan tuntutan pemilik modal. Otonomi relatif diperlukan karena beberapa hal mendasar. Pertama-tama negara memiliki kemampuan melihat kedepan melampaui kepentingan jangak pendek para pengusaha (Block, 1977). Negara misalnya mengambil tindakan yang terkesan membela buruh, seperti menyediakan pendidikan murah. Namun dalam jangka panjang buruh yang pintar bermanfaat bagi peningkatan produktivitas perusahan. Selain itu negara juga perlu memiliki kemandirian tertentu agar mampu mendamaikan para pengusaha yang cenderung bertentangan satu sama lain (Robison, 1986; Hiariej, 2003). Tapi yang perlu dicatat, hubungan negara dan pemilik modal ditandai dengan tarik menarik antara pola interaksi yang bersifat subyektif dan bercorak obyektif (Hiariej, 2003). Interaksi subyektif adalah hubungan negara dan pemodal yang berbasiskan kedekatan personal. Sebaliknya interaksi obyektif tak lain dari model hubungan yang berpegang pada mekanisme pasar dan kompetisi yang adil antara para pengusaha (Poulantzas, 1972).

Tulisan ini akan membahas perkembangan kapitalisme negara di Indonesia dalam tiga dekade terakhir, dengan tujuan memberikan gambaran umum tentang peran dominan negara dalam pembangunan dan perlindungan yang negara berikan kepada kelas pemilik modal. Bagian berikutnya akan membicarakan perkembangan kapitalisme negara di era 1970an. Setelah itu pembahasan difokuskan pada krisis minyak dan desakan reformasi yang mengikutinya yang membawa pengaruh luas terhadap intervensi ekonomi negara dan hubungannya dengan para pengusaha. Bagian ketiga mendiskusikan sebuah moda proteksi baru yang dilakukan negara terhadap para pemilik modal setelah krisis minyak melemahkan kemampuan negara terlibat secara langsung dalam pembangunan melalui pemilikan sumber daya. Bagian terakhir membahas krisis finansial dan tantangan baru terhadap kapitalisme negara di Indonesia.

Peran Negara Sebagai Investor dan Regulator

Secara umum peran negara sebagai agen pembangunan dapat dilihat dengan dua cara. Pertama, negara berpartisipasi secara langsung dalam menumpuk modal dengan cara memiliki sumber daya finansial

dan menanam kapital di berbagai sektor usaha melalui perusahan-perusahan negara. Kedua, negara terlibat secara tidak langsung lewat perencanaan, pembuatan regulasi dan pelaksanaan kebijakan.

Peran negara dalam bentuk pemilikan dan penumpukan kapital berawal pada 1950an ketika perusahan-perusahan negara didirikan sebagai reaksi terhadap nasionalisasi perusahan-perusahan milik Belanda. Namun, dominasi perusahan negara berakhir setelah kegagalan Revolusi 1965. Sembari mencerca buruknya kinerja dan efisiensi perusahan-perusahan ini, pemerintah baru pasca 1965 melakukan berbagai perubahan besar yang berkisar dari pengembalian beberapa perusahan kepada pemilik lamanya dan pemberian otonomi komersial sampai menjadikan perusahan-perusahan tersebut sebagai subyek hukum (Hill, 2000). Langkah-langkah ini diambil karena Orde Baru mulai bergantung pada modal asing dan bantuan internasional dari lembaga-lembaga seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Reformasi perusahan negara, karenanya, bisa dimengerti sebagai pemenuhan kepentingan penetrasi modal internasional. Walau begitu, pembaharuan yang dilakukan Orde Baru menghadapi dua macam kendala. Pertama, banyak perusahan negara berkeberatan untuk mengembalikan wewenang yang dimilikinya kepada negara. Perusahan-perusahan besar seperti Pertamina dan Bulog tetap berada di luar kendali Departemen Keuangan dan terus beroperasi sebagai "*state within state*" (Hill, 2000). Keberatan semacam ini mudah dipahami sejak regulasi bergaya liberal yang dikeluarkan pemerintah membahayakan kepentingan pejabat-pejabat sipil dan militer yang menguasai perusahan-perusahan tersebut. Kedua, pemerintah baru mengalami kesulitan serius dalam menswastakan perusahan-perusahan negara. Sementara menjualnya kepada pemodal internasional hampir tidak mungkin dilakukan, para kapitalis domestik tidak memiliki cadangan kapital yang memadai untuk mememenuhi ambisi privatisasi pemerintah (Robison, 1986).

Pada 1970-an perusahan negara kembali pada peran dominan-nya seiring ledakan minyak bumi yang menambah penerimaan luar negeri Indonesia. Perubahan ini bisa ditemukan dalam jumlah investasi negara di perusahan-perusahan miliknya. Antara 1973 dan 1976 investasi negara meningkat dari Rp. 41 milyar menjadi Rp. 218 milyar. Setelah sedikti melemah pada 1977 akibat skandal korupsi yang

melanda Pertamina, jumlah tersebut terus merangsek naik dari Rp. 253 milyar di tahun 1979 menjadi Rp. 592 empat tahun kemudian (Hill, 2000). Akibatnya selama 1970an sampai awal 1980an—periode saat pemerintah Orde Baru melancarkan pendalaman industrialisasi—investor domestik terbesar adalah perusahan-perusahan milik negara. Meskipun perusahan-perusahan swasta domestik juga mengendalikan sektor-sektor usaha seperti makanan dan minuman, tekstil, semen, metal, pabrik logam, industri mesin dan otomotif, perusahan negara berperan kunci dalam produksi barang-barang kapital dan setengah jadi. Dominasi ini tercermin dalam perubahan struktur *output* produksi manufaktur. Dalam sepuluh tahun sejak 1971 barang-barang jadi—didominasi oleh sektor swasta—menurun dari 80,8 persen menjadi 47,6 persen dari total nilai manufaktur. Di saat bersamaan, barang-barang setengah jadi tumbuh dari 13,1 persen menjadi 33,5 persen dan barang-barang kapital dari 6,1 persen menjadi 16,9 persen. Perkembangan tersebut ikut mendorong pertumbuhan sektor industri dari 7,3 persen dari PDB dengan total nilai Rp. 62 milyar di tahun 1967 menjadi 12,9 persen dari PDB dengan total nilai Rp. 7.681 milyar pada 1982 (Robison, 1987).

Arti penting perusahan negara sebaiknya juga dipahami dengan menilik posisinya dalam struktur perekonomian Indonesia. Sektor-sektor usaha penting yang dikendalikannya mencakup produksi sumberdaya alam, infrastruktur, manufaktur, perbankan dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Pengaruh kuat perusahan negara juga berlangsung di sektor-sektor lain seperti perdagangan, pertanian, transportasi laut dan udara dan konstruksi. Perusahan yang beroperasi di sektor sumberdaya alam menempati kedudukan penting. Sektor ini berfungsi sebagai terminal utama penerimaan luar negeri dari ledakan minyak. Perusahan-perusahan di sektor tersebut bertanggung jawab untuk mengumpulkan royalti dan pajak, membagi-bagikan konsesi dan kontrak dan mengawasi penyediaan produk untuk pasar domestik. Perusahan-perusahan yang sama juga menjadi mitra utama perusahan-perusahan asing dalam melakukan produksi dan investasi (Robison, 1986). Perusahan-perusahan yang termasuk dalam sektor sumberdaya alam adalah Pertamina, PT Timah, Aneka Tambang dan Inhutani.

Perusahan negara yang beroperasi di sektor manufaktur juga berada dalam posisi krusial. Orde Baru tidak hanya memperkuat

kedudukannya, tapi juga memperluas perannya dalam memproduksi barang-barang kapital dan setengah jadi. Ini menyebabkan perusahan-perusahan negara di sektor manufaktur bertambah besar dan kian padat modal dibanding perusahan-perusahan swasta. Mulanya, produksinya terkonsentrasi pada semen, kertas, mesin dan pupuk. Sejak perusahan swasta masuk ke industri ini, perusahan negara memperlebar kegiatan bisnisnya dengan melibatkan aktivitas produksi padat modal seperti baja, petrokimia, penyulingan minyak, logam dasar, kimia dasar dan mesin-mesin berat. Lebih dari itu, negara mulai melakukan investasi besar-besaran di sektor-sektor padat teknologi. Dana dalam jumlah yang besar digelontorkan ke beberapa proyek ambisius seperti pembuatan pesawat terbang dan kapal laut, peralatan komunikasi, pembangkit listrik dan industri pertahanan.

Sementara itu negara juga terlibat dalam merencanankan dan mengembangkan kerangka regulasi yang memadai bagi pembangunan ekonomi. Peran ini bukan barang baru dan terus menempati posisi sentral dalam periode stabilisasi ketika pemerintah Orde Baru menjalankan rehabilitasi ekonomi masif untuk menanggulangi krisis warisan ekonomi terpimpin Soekarno. Sepanjang periode berikutnya, saat pemerintah menggalakan pembanguan sektor idnustri yang terpadu, fungsi regulasi negara ditujukan terutama untuk mendorong partisipasi modal domestik dalam industrialisasi. Dalam banyak hal, regulasi pemerintah melindungi kelas kapitalis dari persaingan bebas dan penetrasi modal asing. Selain itu, negara juga membiayai pebisnis dalam negeri melalui berbagai aturan yang membagi-bagikan subsidi, kredit dan proyek.

Tergolong dalam fungsi regulasi negara masa-masa itu adalah lisensi industri, kendali impor, kendali moneter dan kebijakan fiskal (Shin, 1989). Dengan lisensi industri, negara mengatur semua investasi swasta dan domestik melalui sebuah badan pemerintah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Badan ini menerapkan sejumlah kriteria yang memungkinkan pemerintah mengalokasikan investasi berdasarkan perencanaannya. BKPM kemudian mengeluarkan daftar dan mengkategorikan industri yang ada menurut apakah investor tidak diizinkan, diperbolehkan atau didorong untuk menanamkan modalnya. Sementara regulasi kendali impor berkaitan erat dengan strategi pendalamn industrialisasi. Regulasi ini menekan-

kan perlindungan negara atas produk sektor industri dari produk serupa yang berasal dari luar negeri. Proteksi dimulai ketika sektor industri telah mencapai tingkat produksi yang sesuai. Pemerintah lalu memaksakan kendali impor dengan melarang atau menetapkan pajak yang tinggi pada komoditi tertentu. Senada dengan itu, kendali moneter dimaksudkan untuk mendukung pembangunan sektor industri yang terpadu. Pemerintah menggunakan bank-bank negara dan bank-bank swasta tertentu untuk mengucurkan kredit ke sektor-sektor industri yang termasuk dalam rancangan pembangunan pemerintah. Tak heran jika sebagain besar kredit mengalir ke sektor industri-industri substitusi impor yang didominasi perusahan negara dan perusahan swasta yang memiliki koneksi politik. Tapi, kebijakan fiskal bisa jadi merupakan model regulasi yang paling menentukan dalam mewujudkan peran penting negara dalam pembangunan. Dengan penambahan luar biasa jumlah penerimaan negara yang ditimbulkan oleh peningkatan dramatis harga minyak bumi internasional, pemerintah mampu memperlebar anggaran pembangunannya. Perluasan ini memungkinkan negara membiayai proyek-proyek industri dan pembangunan infrastruktur.

Kejutan Minyak Mengubah Corak Kapitalisme Negara

Sejak paruh pertama 1970an penerimaan minyak menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan negara menjalankan sebuah strategi pembangunan di bawah bimbingannya dengan tekanan luar biasa pada pembangunan sektor industri yang terpadu yang bertolak belakang dengan semangat dan keyakinan neoliberalisme. Ketika harga minyak jatuh peran dominan negara dalam investasi terpukul keras, sementara kemampuan negara untuk mengendalikan kebijakan tidak banyak berubah. Kejutan minyak dan desakan untuk menderegulasi ekonomi akibat krisis ini merubah karakter kapitalisme negara Orde Baru. Kebijakan reformasi tampil sebagai saluran baru yang digunakan negara untuk menentukan pembangunan, membagi-bagikan patronase dan mendukung kelas kapitalis.

Krisis minyak menimbulkan efek buruk terhadap kapitalisme Orde Baru karena dominasi sektor minyak yang melebihi 60 persen ekspor Indonesia. Kejatuhan harga menipiskan penerimaan negara seiring anjloknya penerimaan migas dari Rp. 10.089 milyar pada 1981-

1982 menjadi Rp. 9.520 milyar pada 1983-1984. Penerimaan migas membaik dan mencapai nilai Rp. 11.145 milyar pada 1985-1986 sebelum terpuruk pada angka Rp. 9.738 pada 1987. Gambaran lebih buruk tampak lebih nyata jika penerimaan migas dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya. Sejak 1979 sampai 1982 persentasi penerimaan migas dalam perekonomian Indonesia melebihi 60 persen. Setelah penurunan marginal pada 1982-1983 porsi penerimaan minyak pada 1986-1987 tinggal 45,46 persen. Sebaliknya jumlah penerimaan non migas bertambah lebih dari 100 persen, dari 17 persen total penerimaan negara pada 1980-1981 menjadi 38 persen pada 1986-1987.

Kejutan minyak yang menguras penerimaan pemerintah menghalangi keterlibatan langsung negara dalam pembangunan ekonomi, seperti yang tercermin dalam penurunan penting anggarannya dari $US24.1 milyar menjadi $US17.55 selama kurun waktu 1983-1989 (Lam, 1991). Tak lama setelah kejatuhan harga pertama, pemerintah mengumumkan langkah-langkah pengetatan yang membuat kenaikan 6,1 persen anggaran menjadi Rp. 16,56 trilyun adalah sesungguhnya penurunan 3,6 persen dalam nilai dollar karena jatuhnya nilai rupiah sebanyak 10 persen. Pada 1984-1985 nilai anggaran 24 persen lebih besar sebagai konsekwensi devaluasi yang dilakukan pada Maret 1983, sementara pada 1985-1986 pertambahan anggaran hanya 3,2 persen dalam nilai riil. Tahun fiskal paling buruk adalah periode 1986-1987 ketika pengeluaran negara mengalami kontraksi lebih dari 7 persen untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir. Pada 1987-1988 penurunan anggaran berlangsung terus mencapai 26 persen di bawah nilai anggaran sebelumnya dalam hitungan dollar karena devaluasi rupiah sebanyak 45 persen pada September 1986. Anggaran pemerintah mengalami sedikit pemulihan pada 1988-1989 tapi masih tetap berada di bawah angka periode 1986-1987.

Penggerusan anggaran dicerminkan oleh kecenderungan pengeluaran ketika pertumbuhan konstan belanja negara berhenti secara mendadak pada 1984. Setelah sedikit membaik pada 1985, pengeluaran riil merosot lebih jauh pada tahun berikutnya karena meningkatnya kesulitan fiskal yang dihadapi pemerintah untuk pertama kalinya sejak problem serupa di tahun 1966 (Hill, 2000). Karena 71 persen anggaran pembangunan ditanggung sebagian besar

oleh penerimaan minyak dan gas, belanja pembangunan di tahun 1984 hanya tumbuh 0,57 persen dibanding pertumbuhan 34,52 persen pada 1983. Setelah pertumbuhan moderat 9,24 persen di tahun 1985, kejatuhan harga minyak kedua memaksa pemerintah memangkas jumlah pengeluaran pembangunan hingga mencapi 23,6 persen dari jumlah anggaran tahun sebelumnya. Pada 1987 belanja pembangunan mengalami pemulihan terbatas, tumbuh sebanyak 0,14 persen dan melompat sejauh 29,29 persen sebelum melemah pada angka 12,91 persen per tahun.

Kemerosotan penerimaan minyak boleh menguras energi pemerintah untuk melakukan investasi, tapi tidak melemahkan kemampuannya untuk mengatur ekonomi (Hiariej, 2003). Krisis malah menyebabkan pemerintah bereaksi cepat dengan mengumumkan pengetatan anggaran, menegosiasikan hutang baru dan mendevaluasi nilai rupiah. Pendekatan terapi kejut ini dibarengi dengan upaya yang lebih serius untuk menggalang dana dari sumber-sumber lainnya. Mobilisasi dana-dana alternatif dilakukan melalui reformasi di sektor fiskal dan moneter yang berlangsung antara reformasi pajak dan perbankan yang mengikuti penurunan harga minyak pertama dan reformasi pasar modal setelah penurunan harga kedua pada pertengahan 1980an.

Putaran reformasi pertama terdiri dari deregulasi perbankan 1983 dan peraturan baru perpajakan 1984. Deregulasi 1983 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem perbankan dan untuk menggalang dana dengan menghapus batas kredit, mengurangi kredit likuiditas dan membatasi campur tangan bank sentral dalam implementasi kredit (Pangestu, 1989; Sjahrir, 1989). Tujuan reformasi pajak 1984, di lain pihak, adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki pemungutan pajak dari sumber-sumber non migas. Reformasi ini menghapus *withholding tax*, memperkenalkan pajak pertambahan nilai dan merasionalisasikan pajak pendapatan dan penjualan (Pangestu, 1989).

Pada tahap berikutnya perubahan yang lebih luas di sektor finansial dilakukan yang memungkinkan penggalangan tabungan dan investasi secara cepat dari sumber-sumber domestik dan internasional. Untuk pertama kalinya, pemerintah membolehkan pembukaan bank baru dan cabang-cabangnya dan memberikan izin usaha kepada bank

asing tanpa paksaan untuk membentuk *joint ventures*. Pemerintah juga membolehkan perusahan negara untuk menyimpan uangnya di bank-bank swasta (Sjahrir, 1990; 1992). Hasilnya, jumlah bank swasta berkembang pesat dan mulai mengendalikan lebih dari 53 persen dana perbankan dan 47,7 persen jumlah kredit perbankan dibandingkan dengan 37 persen dan 41,9 persen yang dikontrol bank-bank pelat merah (Robison, 1997). Di saat bersamaan Pasar Modal Jakarta (JSE) diaktifkan kembali dengan maksud menyediakan sumber keuangan lapis kedua bagi sektor swasta terutama sejak perusahan asing diizinkan menanamkan kapitalnya di pasar modal dengan membeli sampai 49 persen saham perusahan-perusahan yang terdaftar. Dana investasi asing segera membanjiri Indonesia dan memompa kapitalisasi pasar dari Rp. 1 trilyun menjadi Rp. 5 trilyun hanya dalam setahun. Perkembangan ini diikuti dengan dibukanya Pasar Modal Surabaya. Jumlah perusahan yang terdaftar disana meningkat dari dua puluh empat menjadi lima puluh tujuh (Sjahrir, 1990; Taubert, 1991).

Setelah reformasi perbankan dan pajak pemerintah mengumumkan berbagai program deregulasi di sektor perdagangan dan investasi. Reformasi perdagangan ditujukan untuk menghancurkan sistem monopoli dan hambatan-hambatan non tarif yang dipandang sebagai penghalang utama peningkatan daya saing internasional barang-barang ekspor dari Indonesia. Reformasi pertama di bulan Mei—yang terkenal dengan istilah Pakem (Paket Mei)—membolehkan produsen yang mengekspor lebih dari 85 persen produksinya untuk mengabaikan agen penyalur tunggal ketika membeli bahan-bahan baku impornya dan berurusan langsung dengan penyuplai asingnya. Paket reformasi kedua dikeluarkan pada Oktober 1986 untuk menghapus 150 jenis impor dan monopoli impor untuk 165 produk dan untuk melonggarkan pembatasan izin atas 110 jenis impor. Pada Januari 1987 pemerintah mengurangi kewajiban impor atas 55 jenis barang lainnya, menghapus pembatasan kuota terhadap kurang lebih 140 macam produk tekstil dan baja dan mencabut hambatan non tarif untuk lebih dari 100 jenis impor (Hiariej, 2003).

Reformasi di sektor investasi berkaitan erat dengan krisis minyak. Meningkatnya ketergantungan pada hutang dan bantuan asing mendorong pemerintah memberikan perhatian yang lebih banyak pada kepentingan IMF, Bank Dunia dan perusahan-perusahan internasional. Kebijakan reformasi investasi pertama yang dikeluarkan pada Juni 1987

mengurangi jumlah sektor yang tertutup bagi investasi asing dari 2942 menjadi 342 dan memudahkan persyaratan dalam pengalihan pemilikan kepada mitra domestik (Hiariej, 2003). Program reformasi kedua berkenaan dengan restrukturisasi pasar modal yang memungkinkan modal asing untuk menanam kapitalnya di sektor perbankan maupun pasar modal.

Kejutan minyak yang melemahkan peran dominan negara dalam investasi memaksa pemerintah untuk mendorong peran modal swasta yang lebih besar. Selama Repelita IV pemerintah mulai mempromosikan kehadiran investasi swasta yang lebih luas yang diharapkan meningkat pada angka 17,6 persen per tahun dari Rp. 8,7 triliun pada 1984-1985 menjadi Rp. 19,5 trilion pada 1988-1989. Pada waktu yang sama pertumbuhan investasi negara direncanakan meningkat hanya sebanyak 14,4 persen per tahun menjadi Rp. 20,5 triliun pada 1988-1989, mencakup 51,3 persen keseluruhan investasi dibanding 54,7 persen pada 1984-1985 (Simandjuntak, 1984). Sepanjang Repelita V, untuk pertama kalinya dalam sejarah kapitalisme Orde Baru modal swasta diperkirakan menyumbang lebih dari 50 persen total investasi dan terus meningkat menjadi dua pertiga dari kesulurahn investasi pada periode berikutnya (Hill, 2000). Peningkatan peran modal swasta kelihatan lebih nyata dari segi porsi pemilikan dalam berbagai sektor perekonomian. Menurut perhitungan Hill (2000) sektor-sektor yang masih bertahan di bawah dominasi negara di akhir 1980 adalah migas, manufaktur, prasarana umum dan perbankan. Sementara itu modal swasta menjadi pemain utama di sektor pertanian, manufaktur non migas, perdagangan, perumahan dan konstruksi.

Sejalan dengan upaya mengedepankan sektor swasta pemerintah juga mulai berupaya mereformasi sektor negara. Pada akhir 1986 sebuah reviu yang menyeluruh dilakukan, diikuti dengan pembentukan sebuah tim tingkat tinggi untuk menilai laporan-laporan tentang perusahan-perusahaan negara dari kementerian yang terkait. Pada Oktober 1988 Departemen Keuangan mengeluarkan sebuah laporan yang mengurutkan perusahan negara berdasarkan tingkat keuntungan, likuiditas dan kemampuan membayar hutang. Menurut laporan ini 189 dari 212 perusahan negara bisa diklasifikasikan menjadi sangat baik, baik, kurang baik dan buruk. Urutan dan penggolongan dilakukan untuk memutuskan jenis reformasi yang diperlukan yang berkisar dari

meningkatkan efisiensi sampai privatisasi sebagian atau seluruhnya (Arndt and Hill, 1988; Pangestu, 1989; Hill, 2000).

Tampaknya reformasi membuktikan kesungguhan pemerintah untuk membuang praktis bisnis lama yang berkaitan erat dengan strategi pembangunan yang dibimbing negara, seperti pemberian konsesi dan hak monopoli yang menciptakan "perekonomian biaya tinggi". Keputusan pemerintah melonggarkan monopoli impor, contohnya, merupakan bencana bagi kapitalis kelas kakap yang sudah menggantungkan keberuntungannya pada proteksi negara. Meski begitu, kebijakan-kebijakan reformasi hanya menjadi sebuah cara baru bagi pemerintah untuk mempertahankan langkah-langkah protektif dan jaringan patronasenya diantara kelas pemiliki modal, terutama dengan para pengusaha yang sangat diuntungkan oleh strategi pembangunan yang dibimbing negara. Dalam kasus penghapusan monopoli impor, kebijakan ini mulanya dipuji sebagai serangan terhadap tingginya harga barang impor bagi kebutuhan bahan baku sektor manufaktur yang merusak kemampuan berkompetisi produk industri Indonesia di pasar dunia. Tapi, terbukti kemudian reformasi tak lain dari *old wine in new bottles.* Reformasi perdagangan tidak mampu mempengaruhi monopoli impor di sektor-sektor seperti farmasi, ban, plastik, baja, pelat timah dan susu (Robison, 1992). Sementara, monopoli cengkeh yang menguntungkan yang dikuasai Liem Sioe Liong dan saudara tiri Soeharto, Probosutedjo, tetap tidak terjamah tak peduli keluhan para produsen rokok yang ditekan untuk membuli cengkeh impor dengan harga yang lebih mahal (Robison, 1992). Sampai akhir 1986, jumlah jenis barang yang dihapus dari monopoli impor hanya sekitar $US300 juta sampai $US400 juta nilai impor per tahun, sedangkan monopli masih menguasai nilai impor sebanyak $US1500 juta (Robison, 1992). Tegasnya, reformasi perdagangan telah dimanfaatkan sebagai bentuk baru patronase untuk menjaga akumulasi keuntungan para pengimpor, terutama kapitalis kelas kakap yang memiliki koneksi dengan pusat kekuasaan, seperti Liem Sioe Liong dan sanak saudara Soeharto.

Regulasi Negara Melindungi Pengusaha

Seperti digambarkan di atas, negara melindungi para kapitalis yang paling berpengaruh dari efek destruktif yang ditimbulkan

reformasi. Deregulasi perdagangan untuk membasmi monopoli impor, misalnya, gagal menyentuh sektor-sektor seperti farmasi dan plastik karena kedua sektor tersebut berada di bawah kendali pengusaha besar yang memelihara hubungan baik dengan pusat kekuasaan. Lebih dari itu, kesulitan fiskal tidak menciptakan hambatan yang terlalu banyak pada sektor-sektor yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan sektor-sektor domestik lainnya seperti otomotif dan petrokimia (Robison, 1997). Di sektor-sektor non reformasi ini negara meneruskan kebiasaannya membagi-bagikan hak monopoli, kontrak, konsesi dan kredit. Pada 1990an hak monopoli paling kontroversial dihadiahkan kepada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) untuk membeli dan menjual cengkeh petani Indonesia. Pembentukan BPPC dimudahkan oleh hutangan sebanyak $US350 juta yang digelontorkan oleh bank sentral dengan bungan rendah. Selain itu, pemerintah memaksa produsen rokok untuk membeli cengkeh dari BPPC (Robison, 1997; Schwartz, 1999).

Tapi yang terpenting, upaya negara merestrukturisasi ekonomi menyediakan kesempatan bisnis baru yang menggiurkan bagi kelas kapitalis. Fungsi regulasi yang tidak banyak terpengaruh oleh krisis minyak telah digunakan negara bukan saja untuk mempertahankan cengkeraman dan keterlibatan ekonominya, tapi juga membagi-bagikan patronase dan melindungi para pengusaha. Tiga sektor reformasi muncul sebagai wilayah penumpukan kapital yang paling menguntungkan. Pertama adalah reformasi investasi yang tidak hanya membebaskan penetrasi modal asing, tapi juga membolehkan perusahan asing untuk membentuk *joint ventures* dengan mitra lokal (Robison, 1997). Kelihatan jelas kapitalis kelas kakap menjadi pihak yang paling diuntungkan karena mereka memiliki cadangan modal yang memadai untuk berpartisipasi dalam perjanjian kepemilikan bersama dengan mitra asing. Para pengusaha besar juga diuntungkan lantaran investor asing cenderung memilih bisnis domestik yang memiliki koneksi politik dengan kekuasaan (Robison, 1997).

Wilayah kedua reformasi adalah swastanisasi. Alasan dibalik transfer pemilikan berkenaan dengan persoalan fiskal dan kinerja buruk perusahan-perusahan negara (Pangestu, 1996; Robison, 1997). Tapi dalam praktiknya privatisasi tidak lebih dari sebatas pengalihan monopoli negara menjadi monopoli swasta di sektor-sektor usaha yang

menguntungkan seperti televisi, telekomunikasi, listrik, transportasi udara dan konstruksi dan pengoperasian jalan dan pelabuhan. Ketika privatisasi berlangsung, perusahan-perusahan negara yang beroperasi di sektor tersebut dijual kepada pengusaha besar yang memiliki hubungan baik dengan pusat kekuasaan, biasanya dengan harga rendah dan tanpa prosedur yang transparan (Robison, 1997).

Wilayah ketiga adalah dergulasi di sektor keuangan sebagai upaya pemerintah menggalang sumber-sumber dana alternatif untuk investasi. Mobilisasi dana-dana domestik berhubungan dengan dua kebijakan reformasi: Pakjun 1983 dan Pakto (Paket Oktober) 1988. Meskipun Pakjun dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi perbankan, reformasi ini mengubah status bank-bank pemerintah menjadi bank komersial, yang membuat kredit pemerintah ikut berubah menjadi kredit komersial (Rosser, 2002). Akibatnya Pakjun memungkinkan pebisnis besar memperoleh akses ke sumber daya kapital yang teramat banyak milik bank-bank pelat merah hanya lantaran mereka mampu membayar bunga yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Para pengusaha besar juga berada dalam posisi yang menguntungkan karena meningkatnya persaingan dalam industri perbankan selepas deregulasi memaksa bank-bank pemerintah untuk menambah pangsa pasarnya dengan cara menghamburkan pinjaman sebanyak yang mereka bisa lakukan (Rosser, 2002). Tak mengejutkan jika bank pemerintah menjalankan peran kunci dalam membiayai investasi berskala raksasa yang dimiliki kapitalis kelas kakap. Karena pinjaman bank berkaitan erat dengan koneksi politik, Pakjun menciptakan momok kredit macet yang menghantui bank pemerintah sejak awal 1990an. Salah satunya adalah skandal Bapindo yang dilaporkan memiliki kredit macet sejumlah kurang lebih Rp. 2453 milyar atau sekitar 28 persen dari keseluruhan pinjaman yang dikeluarkannya. Pada Februari 1994 Bapindo diputuskan bersalah melanggar UU perbankan dengan meminjamkan $US430 juta kepada Eddy Tansil dari Golden Key Group (van Klinken, 1994; Robison, 1997).

Pakto 1988 merupakan kebijakan deregulasi perbankan lainnya yang ditujukan untuk mempermudah pendirian bank baru domestik maupun asing dan cabang-cabangnya di Indonesia. Deregulasi ini menciptakan peluang bagi pengusaha besar untuk memperlebar kegiatan usahanya ke industri perbankan, seperti yang tampak dalam

melonjaknya jumlah bank swasta. Aset yang dimiliki bank-bank tersebut tumbuh pesat dari 24 sampai 41 persen dari keseluruhan aset industri perbankan dalam periode 1988-1993, dibandingkan dengan merosotnya aset bank-bank pelat merah dari 71 menjadi 51 persen. Pertumbuhan total kredit bank juga menunjukkan pola serupa. Pada 1995 dari lima bank peringkat teratas (diurut berdasarkan jumlah alokasi kredit), tiga diantaranya merupakan bank swasta (Habir, 1994; Pangestu, 1996; Infobank Oktober, 1995). Peningkatan jumlah bank swasta menyediakan kebebasan yang lebih luas bagi kapitalis kelas kakap untuk meminjam uang dari banknya sendiri. Sejak penghapusan batas kredit, bank-bank miliknya leluasa mengucurkan kredit sebanyak yang mereka inginkan, yang biasanya mengalir ke perusahan-perusahan yang berada dalam satu grup usaha yang sama dengan bank bersangkutan. Berdasarkan sebuah laporan, dari 240 bank yang terdaftar di tahun 1995 lebih dari separuhnya memberikan kredit kepada grup usahanya sendiri (Infobank Oktober, 1995).

Di lain pihak, mobilisasi dana dari sumber-sumber internasional berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang mengintegrasikan perekonomian Indonesia ke dalam proses globalisasi keuangan. Alasan utama pengintegrasian ini adalah meningkatnya ketergantungan kapitalisme Orde Baru terhadap modal segar sejak krisis minyak mengeringkan cadangan finansial negara. Sekalipun Pakjun dan Pakto berhasil menggalang dana-dana dari perusahan swasta dan individu, jumlah modal domestik masih jauh di bawah kebutuhan investasi Indonesia. Situasi ini menekan pemerintah untuk mencari sumber alternatif dari luar negeri.

Upaya pemerintah Orde Baru untuk membebaskan pergerakan modal asing harus dilihat dalam bentuk dua kelompok kebijakan reformasi yang berbeda. Kebijakan reformasi pertama bertujuan mempermudah prosedur peminjaman internasional yang mencakup penggantian batasan khusus dalam pinjaman asing dengan pembatasan yang bersifat harian, insentif bagi arus masuk modal jangka pendek, perlindungan dari resiko pertukaran mata uang asing dan subsidi bagi pinjaman komersial luar negeri (Nasution, 1992). Pinjaman internasional meningkat cepat mencapai hampir $80 milyar, dengan pinjaman komersial swasta sebanyak kurang lebih $US23 milyar atau 30 persen dari keseluruhan hutang luar negeri (Schwartz, 1999). Para

kapitalis kelas kakap menjadi pihak yang paling diuntungkan oleh regulasi baru. Mereka berlomba-lomba mencari pinjaman luar negeri. Pada 1995 saja tercatat 119 kali transaksi pinjaman asing yang dilakukan 100 perusahan swasta dengan jumlah pinjaman sebesar $US7872 juta. Pada 1997 sembilan dari sepuluh debitor luar negeri teratas adalah perusahan swasta (Infobank April, 1996; Februari, 1997).

Kebijakan reformasi kedua berkaitan dengan deregulasi pasar modal tahun 1987 dan 1988 yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali JSE sebagai sumber dana alternatif. Hasilnya, sampai akhir 1993 tidak kurang dari 172 perusahan terdaftar di JSE dengan kombinasi kapitalisasi pasar untuk ekuitas dan obligasi sekitar Rp. 69 triliun (Noerhadi, 1994; Habir, 1994). Kapitalis kelas kakap diuntungkan oleh reformasi pasar modal melalui tiga cara (Rosser, 2002). Pertama, mereka memperoleh akses yang murah ke modal portofolio internasional; kedua, mereka dapat memperluas usahanya ke wilayah industri baru yang berkaitan dengan pasar modal; dan, ketiga, para pebisnis besar juga berkesempatan meragamkan struktur kepemilikannya.

Krisis Finansial Menimbulkan Krisis Kapitalisme Negara

Tegasnya, krisis minyak telah melahirkan sebuah corak baru kapitalisme negara Orde Baru. Keterlibatan negara dalam pembangunan tetap besar dan menentukan, tapi semuanya terpusat pada fungsi membuat kebijakan ekonomi. Sekalipun semua inisiatif melaksanakan reformasi ekonomi berasal dari dalam tubuh pemerintah sendiri lantaran terdesak oleh anjloknya harga minyak bumi, kebijakan perbaikan tersebut membawa berkah keuntungan tidak sedikit bagi para pemilik modal. Masih dengan modus yang serupa, reformasi memungkinkan pemerintah mempertahankan jaringan patronasenya. Namun situasi ini berubah total ketika Indonesia dihantam oleh badai krisis mata uang yang bermula di Thailand pada pertengahan 1997. Pertama, keterlibatan eksesif pemerintah dalam pembangunan kian terdesak. Kedua, kebiasaannya membagi-bagikan patronase melalui fungsi regulasi berada dalam ancaman serius.

Globalisasi Finansial dan Krisis Moneter

Cerita bermula di awal 1990an ketika sebagian besar perekonomian negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara mengalami peningkatan luar biasa arus masuk kapital internasional. Tekanan globalisasi tersebut telah dimulai satu dekade lebih awal ketika pemerintah AS berupaya mengatasi defisit anggaran dan perdagangannya—terutama dengan Jepang—dengan cara mendongkrak nilai yen terhadap dollar AS melalui *Plaza Accord* pada 1985. Apresiasi nilai yen mendorong relokasi industri-industri Jepang ke Asia Timur dan Asia Tenggara yang masih mematok nilai mata uangnya dengan dollar secara ketat untuk menjamin tingkat persaingan produk-produk manufakturnya di pasar dunia (Bello, 1998; Wade, 1998; Hoogvelt, 2001). Sementara itu, perekonomian Jepang mulai mendekati krisis keuangan. Sebuah kekuatan bersama yang melibatkan AS dan Jepang melakukan intervensi dalam pasar mata uang asing untuk menyesuaikan nilai yen terhadap dollar AS, dengan tujuan melonggarkan kebijakan moneter Jepang (Bello, 1998; Wade, 1998; Hoogvelt, 2001). Bersama dengan kebijakan ekspansioner bank sentral negara-negara Eropa daratan, kebijakan moneter Jepang yang longgar menciptakan likuiditas dalam jumlah yang luar biasa banyaknya di pasar internasional. Sebagian besar dana-dana ini berada di bawah kendali lembaga-lembaga keuangan di AS, Eropa dan Jepang. Dengan jumlah modal yang membludak, tingkat suku bunga dalam negeri yang rendah dan keberhasilan agen-agen internasional seperti IMF dalam membuka pasar modal di seantero dunia, para pemilik modal di AS, Eropa dan Jepang siap menanamkan kapitalnya ke luar negeri. Perekonomian Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan wilayah tujuan paling digemari karena tingginya tingkat suku bunga di kawasan ini (Wade, 1998; Hoogvelt, 2001).

Seperti dicatat sebelumnya, arus masuk modal ke Indonesia bukan hanya lantaran tekanan globalisasi finansial. Negara juga memainkan peran kunci dalam membuka perbatasan Indonesia bagi penetrasi modal asing. Akibatnya, arus modal masuk antara 1990 dan 1994 mencapai jumlah $US14,7 milyar. Antara 1990 dan 1996 tingkat arus masuk modal bersih per tahun sekitar 3,9 persen dari PDB. Investor asing berlomba-lomba membeli saham, surat berharga dan real estate seraya menanamkan modalnya di sejumlah proyek infrastruktur

yang sedang tumbuh pesat. Sistem perbankan dalam negeri merubah sebagai arus modal masuk menjadi pinjaman untuk membiayai investasi di sektor properti yang cukup menjanjikan seperti perhotelan dan penginapan untuk wisatawan, taman-taman hiburan, gedung perkantoran dan mal-mal perbelanjaan (Nasution, 1999).

Karena pentingnya pengaruh koneksi politik sebagian besar dana segar yang baru masuk mengalir ke pundi-pundi Soeharto dan kroni-kroninya. Hubungan dekat dengan pusat kekuasaan membuat alokasi sumberdaya bisa mengabaikan kerangka regulasi yang ada. Pertumbuhan cepat hutang luar negeri Indonesia, sebagai contoh, tidak dibarengi dengan sistem kontrol yang baik. Upaya para teknokrat untuk menekan laju pinjaman luar negeri yang melampaui batas tidak cukup berhasil karena pemerintah terus menyediakan jaminan bagi hutang sektor swasta, termasuk pinjaman asing yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang dikendalikan sekutu-sekutu Soeharto (Robison and Rosser, 2000). Hasilnya, melimpahnya pinjaman sektor swasta menaikan tingkat hutang luar negeri Indonesia ke zona yang membahayakan. Antara 1991 dan 1997 hutang luar negeri melonjak dari $US66,9 milyar menjadi $US131,4 milyar dengan tingkat kewajiban hutang antara 30 dan 34 persen dari ekspor. Sekitar separuh dari jumlah ini tergolong pinjaman jangka pendek dengan rata-rata masa pengembalian sekitar satu setengah tahun (Nasution, 1999).

Kerangka kebijakan yang buruk juga berlaku untuk sistem perbankan. Persyaratan kelayakan kapital tidak memenuhi standar internasional. Aturan tentang batas pinjaman cenderung lemah, sementara peningkatan jumlah pinjaman dalam satu grup usaha kian membahayakan (Rosser, 2002). Di awal 1990an deregulasi perbankan berakhir dengan ambruknya beberapa bank swasta. Bank Sampoerna dan Bank Summa, diantaranya, hampir bangkrut karena keterlibatann-nya yang berlebihan dalam pinjaman dalam satu grup usaha. Ketika perusahan-perusahan dalam grup usahanya mengalami kesulitan, kedua bank tersebut segera merasakan imbasnya (Rosser, 2002). Persoalan lainnya adalah hantu kredit macet. Pada 1996 kurang lebih 8,8 persen dari keseluruhan kredit bank bisa dikategorikan sebagai kredit macet. Sampai bulan November tahun yang sama kredit macet telah mencapai angka Rp. 10,4 triliun, sekitar 10 persen dari total

pinjaman dan sepadan dengan 2 persen PDB. Bank-bank pemerintah mengendalikan 68 persen kredit macet. Penyebabnya, para kapitalis yang memiliki koneksi politik selalu bisa meminjam dari bank pelat merah sekalipun tidak memiliki proyek yang masuk akal dan jaminan yang memadai (Nasution, 1999; Rosser, 2002).

Ketika hubungan negara dan modal yang bersandar pada koneksi kekuasaan yang melahirkan perilaku usaha yang beresiko tinggi bergabung dengan faktor kapital yang mudah berpindah hasilnya adalah malapetaka. Pinjaman yang melampaui batas dan sistem perbankan yang buruk menimbulkan efek yang merusak ketika Indonesia dilumpuhkan oleh krisis mata uang yang dipicu oleh krisis baht. Para pedagang valuta asing berkeyakinan defisit transaksi berjalan dan jatuh temponya hutan-hutang jangka pendek perusahan-perusahan swasta Thailand telah menggelincirkan perekonomian negeri tersebut ke jurang krisis. Para pedagang ini mulai menjual baht dan menggantikannya dengan mata uang lain yang lebih kuat. Karena tekanan atas baht terus meningkat, pemerintah Thailand memutuskan untuk mengambangkan mata uangnya pada 2 Juli 1997 (Wade, 1998; Winters, 2000).

Krisis baht membuat para investor menilai kembali tingkat resiko usaha di Indonesia (McLeod, 1997; Wade, 1998; Garnaut, 1998; Thee, 1998; Winters, 2000). Selama masa-masa pertumbuhan fokus perhatian ditujukan pada beberapa faktor ekonomi makro seperti defisit anggaran, perbandingan hutang dan PDB dan pertumbuhan ekspor. Seiring krisis Thailand para penanam modal mulai memberikan perhatian yang lebih banyak pada faktor-faktor resiko yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan komponen-komponen ekonomi mikro seperti jumlah hutang dalam dollar dengan masa pengembalian satu tahun, perbandingan hutang dan saham sektor perusahan dan mata uang dominan dalam hutang luar negeri. Resiko paling buruk adalah perusahan-perusahan swasta yang telah melakukan peminjaman di luar negeri melampaui batas tanpa jaminan yang memadai akan menghadapi kesulitan serius jika rupiah terdepresiasi. Begitu perhitungan semacam ini berubah menjadi kepanikan, para investor asing maupun domestik berlomba menjual sahamnya di perusahan-perusahan yang terdaftar di pasar modal, terutama perusahan-perusahan yang diyakini berada dalam kondisi rentan terhadap resiko

pertukaran mata uang asing. Rupiah ditukarkan dengan dollar atau mata uang yang lebih kuat lainnya. Sementara upaya pemerintah untuk menghambat devaluasi rupiah malah memperburuk krisis. Dalam banyak hal reaksi pemerintah justeru menyadarkan para penanam modal bahwa perekonomian Indonesia berada dalam kesulitan besar dan membuat tekanan terhadap rupiah tak terhentikan (Winters, 2000). Segera saja nilai rupiah terjun bebas. Terdevaluasi dari Rp. 2400 per satu dollar AS di awal Juli 1997 menjadi lebih dari Rp. 3000 empat bulan kemudian dan mendekati Rp. 16.000 di bulan Januari 1998. Pada 22 Mei, sehari setelah Soeharto mundur, nilai rupiah hanya tinggal 20 persen dari nilai sebelum krisis (Johnson, 1998).

Krisis finansial memaksa pemerintah untuk mengambil insiatif reformasi. Reaksi pertama pemerintah adalah memperluas rentang campur tangannya dalam pasar mata uang asing. Ketika tindakan ini gagal meringankan tekanan terhadap rupiah, BI memutuskan untuk mengambangkan nilai rupiah dan memperketat likuiditas untuk mengendalikan inflasi dan memikat pemegang rupiah (Soesastro and Basri, 1998). Tapi tetap saja nilai rupiah tak kunjung pulih. Pemerintah bereaksi dengan cara lain lewat penyesuaian harga bahan bakar, melonggarkan likuiditas, mengurangi tingkat bunga dan membatalkan atau menjadwal ulang proyek-proyek raksasa. Pemerintah juga berniat menggabungkan bank-bank pelat merah dan mendorong bank-bank swasta untuk melakukan hal yang sama. Perusahan-perusahan swasta yang tergantung pada modal asing dianjurkan untuk mengurangi aktivitasnya. Akhirnya pada 8 Oktober 1997 meminta bantuan IMF (Soesastro and Basri, 1998). IMF meningkatkan tekanan untuk reformasi menyeluruh berdasarkan pendekatan terapi kejut. IMF juga memaksa pemerintah untuk meninggalkan kebiasaannya membagi-bagikan patronase dan korupsi yang dipandang sebagai penyebab utama krisis. Pendekatan IMF mulanya menuai kritik karena lembaga ini tidak memperhatikan arus bebas kapital sebagai salah satu sumber penting krisis finansial (Wade, 1998; Haggard, 2000; Higgot, 2000). Meski begitu, IMF memiliki kekuasaan yang lebih dari cukup untuk mendesakkan kebijakan-kebijakan resesionisnya sebagai jalan keluar karena badan internasional tersebut mengendalikan sejumlah $US43 milyar dana penyelamatan yang sangat dibutuhkan pemerintah. Sekalipun reformasi sulit dihindarkan, negara hampir tidak mungkin mengurangi keterlibatannya dalam pembangunan dan merestrukturisasi alokasi

sumberdaya yang bersandar pada koneksi politik sebab tindakan semacam itu akan membahayakan kepentingan elemen paling penting dari basis kekuasaannya. Krisis dan permintaan bantuan IMF, karena itu, memperunyam ketegangan yang sedang berkembang dalam tubuh kelas yang berkuasa antara kelompok yang menyokong reformasi struktural dan liberalisasi pasar melawan Soeharto dan kroni-kroninya yang akan terpuruk jika perubahan ekonomi benar-benar dilakukan.

Konflik seputar Isu Reformasi Ekonomi

Ketegangan dan perseteruan seputar reformasi ekonomi dimulai pada akhir Oktober 1997. Setelah tiga minggu bernegosiasi IMF dan teknokrat liberal dalam kabinet mengumumkan sebuah paket reformasi. Sehari setelah pengumuman tersebut Menteri Keuangan melikuidasi enam belas bank swasta domestik sebagai bagian dari kesepakatan dengan IMF (Robison and Rosser, 1998; 2000; Soesatro and Basri, 1998). Karena tiga dari bank yang dilikuidasi dimiliki keluarga Soeharto, hanya dalam beberapa hari Bambang—anak Soeharto yang memiliki Bank Andromeda yang dilikuidasi—menolak keputusan Menteri Keuangan dan mengancam akan memperkarakannya di pengadilan. Di akhir November perselisihan ini bisa diatasi setelah BI membolehkan Bambang mendirikan bank baru dan mengakuisisi aset yang dimiliki Bank Andromeda (Robison and Rosser, 1998). Tak seberapa lama semua menjadi jelas, Soeharto dan sekutu-sekutunya telah melancarkan "serangan balik". BI, misalnya, terus menyediakan fasilitas likuiditas untuk bank-bank sakit seperti BCA. Paket reformasi IMF tidak menghapus proyek mobil nasional, monopoli cengkeh (yang dikuasai Tommy), proyek pesawat jet (yang dikuasai Habibie) atau kartel *plywood* (Bob Hasan). Sementara itu pemerintah memperpanjang beberapa proyek raksasa yang dikendalikan oleh Citra Lamtorogung Group (milik Tutut), Nusamba Group (Bob Hasan) dan Datam Group (Titiek). Pada 6 Januari 1998 pemerintah mengumumkan perluasan anggaran yang bertentangan dengan tuntutan menghasilkan surplus anggaran yang dikehendaki IMF (Robison and Rosser, 1998; 2000; Haggard, 2000; Rosser, 2002).

Resistensi ini menyebabkan IMF meningkatkan tekanannya dan mengancam menarik kembali pinjaman taktisnya. Beberapa pemimpin dunia, termasuk Bill Clinton, Helmut Kohl, John Howard dan Goh Cok Tong menelepon Soeharto berupaya membujuknya untuk menghormati

komitmen reformasinya (Robison and Rosser, 1998; 2000; Haggard, 2000). Di saat bersamaan perlawanan Soeharto dan kroni-kroninya menimbulkan tekanan lebih lanjut terhadap rupiah. Seiring dengan pengumuman anggaran baru di awal tahun, nilai rupiah merosot melebihi Rp 10.000 untuk $US 1. Terperosoknya nilai rupiah dan pelarian kapital lebih jauh memaksa pemerintah menyelenggarakan negosiasi baru. Setelah negosiasi putaran kedua, IMF keluar dengan program pembaharuan yang lebih luas dan radikal, yang mencakup upaya memberikan BI kemandirian yang lebih besar. Selain itu keistimewaan pajak untuk proyek mobil nasional dicabut sedangkan kartel semen, kertas dan *plywood* diberangus. Monopoli cengkeh dihapuskan dan dukungan anggaran untuk IPTN dihentikan. IMF juga memaksa revisi anggaran dan mencabut subsidi bahan bakar, listrik dan barang-barang kebutuhan poko lainnya (Rosser, 2002).

Soeharto dan sekutu-sekutu bisnisnya, di sisi lain, terus menunjukkan resistensinya terhadap reformasi ekonomi. Sekalipun penghapusan kartel *plywood* yang dimiliki Bob Hasan (APKINDO) telah dilakukan, para pengekspor masih diwajibkan menggunakan jasa angkutan yang dikuasai APKINDO. Keistimewaan pajak untuk mobil nasional tampak dipulihkan untuk sementara dan BPPC diganti dengan sebuah koperasi baru. Sementara Soeharto mulai mencela paket reformasi IMF sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi negara. Dia juga menuduh tindakan IMF menarik subsidi atas barang-barang kebutuhan pokok sebagai upaya menyulut kerusuhan sosial. Namun reaksi paling mengkhawatirkan dari sudut pandang IMF adalah pengumuman pemerintah tentang pembentukan dewan mata uang (*currency board*) untuk mengatur nilai rupiah (Rosser, 2002). Jelas, usulan dewan mata uang mencerminkan upaya Soeharto mengurangi ketergantungan Indonesia pada IMF, sembari memberi tekanan lebih besar pada penyelesaian krisis mata uang ketimbang restrukturisasi perekonomian. Baik pemerintah negara-negara Barat maupun IMF menolak menyetujui pembentukan dewan mata uang. Pada 7 Maret IMF memutuskan untuk menunda memberikan paket pinjaman bernilai sekitar $US 3 milyar. Pada tanggal 10 Maret Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia melakukan hal yang sama, menahan pemberian bantaun sebesar $US 1 milyar dan $US 1,5 milyar (Rosser, 2002). Pada titik ini ambruknya sektor finansial mulai mempengaruhi sektor riil ketika produksi mulai menurun. Kesulitan lain kemudian mengiringi seperti inflasi yang

meroket, kemerosotan pendapatan, membludaknya pengangguran dan membengkaknya jumlah orang miskin. Situasi politik mulai tidak stabil, sementara oposisi terhadap rezim yang berkuasa tumbuh kian kencang dan kerusuhan sosial meledak di hampir seluruh penjuru negeri.

Untuk ketiga kalinya pemerintah dipaksa menggelar negosiasi dengan IMF. Lembaga ini menunjukkan kesediaannya memberi beberapa konsesi khususnya dalam menunda pencabutan subsidi dan menyetujui defisit anggaran negara sampai minus 3,2 persen. Tapi, IMF juga mengajukan banyak program reformasi baru. IMF memaksa privatisasi tujuh perusahaan negara dan memaksa negara melepas sahamnya pada enam perusahaan yang terdaftar di pasar modal. UU baru yang mengatur kebangkrutan dan peradilan perdagangan juga diusulkan dan pengurangan hambatan perdagangan di bidang-bidang seperti perdagangan grosir dan ekspor minyak kelapa sawit (Rosser, 2002).

Saat kemerosotan ekonomi dan politik terus menjalar ke seluruh pelosok negeri, Soeharto dan kroni-kroninya dipaksa untuk memberi konsesi. Konsesi terpenting adalah keputusan pemerintah membatalkan rencana dewan mata uang. Pada 1 April 1998 harga berbagai komoditi kebutuhan pokok seperti gula, tepung terigu dan jagung dinaikkan. Pada 22 April pemerintah mengumumkan keberhasilannya memenuhi tenggat waktu implementasi paket reformasi putaran pertama, termasuk di dalamnya penghapusan monopoli cengkeh dan dicabutnya pelarangan ekspor minyak kelapa sawit. Pada 4 Mei pemerintah menaikkan harga bahan bakar dan listrik. Meski kenaikan harga kemudian dibatalkan, kebijakan ini sudah terlanjur memicu kerusuhan sosial yang meluas (Robison and Rosser, 2000; Haggard, 2000; Rosser, 2002). Tampaknya IMF sudah berhasil mengambil alih situasi. Reformasi ekonomi mulai menunjukkan pengaruhnya setelah pengunduran diri Soeharto.

Paket reformasi IMF yang keempat dikeluarkan pada 24 Juni 1998, dengan prioritas utama pada jaminan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok yang memadai dan restrukturisasi sektor perbankan (Johnson, 1998). Selepas negosiasi putaran keempat ini Bank Pembangunan Asia menyetujui $US 1,5 milyar pinjaman untuk memulihkan sektor finansial. Bank Dunia juga menyepakati bantuan sebesar $US 1 milyar, dengan sejumlah $US 600 juta yang bisa segera

dimanfaatkan. Sementara IMF mengucurkan dana sebesar $US 1 milyar kepada pemerintah. IMF juga mengumumkan keberhasilannya mengumpulkan lebih dari $US 6 milyar untuk membiayai defisit anggaran.

Krisis ekonomi menciptakan peluang bagi reformasi kapitalisme negara. Kenyataannya, krisis memperkuat posisi teknokrat liberal dan agen-agen internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk menggelar sebuah reformasi ekonomi radikal berdasarkan ortodoksi neoliberalisme. Reformasi dilakukan dengan tujuan merekapitalisasi dan mengorganisir kembali sektor swasta dan publik yang tertimpa krisis. Semua pemerintah baru juga dipaksa untuk melawan aliansi lama antara pejabat dan pengusaha klien yang menjadi sumber penyelewengan dan kolusi dalam pengalokasian kontrak pembangunan dan kredit negara (Robison, 2001; Hiariej, 2003). Dengan cara itu, teknokrat liberal dan para pendukungnya berupaya untuk menyudahi keterlibatan berlebihan negara dalam perekonomian. Serangkaian program reformasi dilakukan terhadap sektor negara. Selain privatisasi, pemerintah-pemerintah baru juga mulai berani membatalkan beberapa kontrak pembangunan yang menguntungkan kroni-kroni Soeharto, seperti kontrak-kontrak untuk Pertamina, PLN dan Industri hutan. Monopoli Bulog dalam mendistribusi barang-barang kebutuhan pokok dihapus. Reformasi juga berlangsung di sektor swasta. Pemerintah melakukan proses audit, reformasi kelembagaan dan tindakan legal terhadap para penghutang yang sulit diajak bekerja sama (Robison, 2001; Hiariej, 2003).

Walau begitu, gerakan reformasi menghadapi beberapa hambatan berat. Aliansi pejabat dan pengusaha klien tetap bertahan. Dana-dana ekstra anggaran masih menjadi sumber penting yang dimanfaatkan para pejabat negara untuk meningkatkan kekuatan politik dan finansialnya. Sebuah skandal yang melibatkan Presiden Abdurrachman Wahid dalam penggelapan dana sebesar kurang lebih Rp. 3,5 milyar dari Bulog menggambarkan persoalan ini. Senada dengan itu, upaya memberesi bank sentral tidak dengan sendirinya mengakhiri proses alokasi kredit yang dilakukan secara sembrono. Pemerintah, misalnya, menggelontorkan fasilitas kredit sekitar $US 96 juta kepada Texmaco, sekalipun perusahaan ini sempat terancam bangkrut. Reformasi sektor negara untuk membersihkan model alokasi kontrak yang bersifat

kolusif tidak sepenuhnya berhasil. Penilaian ulang yang dilakukan terhadap kontrak PLN beberapa tahun lalu, yang berkaitan dengan kepentingan bisnis sekutu-sekutu Soeharto, secara ironis ditolak oleh perusahaan-perusahaan asing yang sudah terlibat jauh di sektor ini. Karenanya, reformasi bukan hanya gagal menghancurkan kapitalisme negara yang lama, tapi juga tidak cukup berhasil melahirkan sebuah perekonomian pasar bebas.

Penutup

Tulisan ini menunjukkan selama kurang lebih 30 tahun terakhir negara memainkan peran menentukan dalam pembangunan ekonomi dan melindungi para pemodal. Keterlibatan dalam pembangunan ekonomi diwarnai dengan kian merosotnya peran langsung negara lewat pemilikan sumber daya, terutama sejak krisis minyak pertengahan 1980an. Meski begitu fungsi regulator negara tetap seperti sedia kala; bahkan kian penting sekalipun kapitalisme Indonesia dipaksa melakukan reformasi besar-besaran selepas krisis keuangan 1997-1998. Di lain pihak upaya negara melindungi kelas kapitalis menunjukkan gambaran yang tidak kalah menariknya. Secara garis besar ketegangan antara hubungan negara-pemodal yang subyektif dan obyektif masih terus berkecamuk. Krisis selalu menjadi titik penting bagi setiap upaya mendesakkan pola hubungan yang obyektif. Tapi ketika situasinya pulih godaan untuk mengembalikan pola hubungan yang subyektif tetap besar.

Reformasi, terutama pada tataran ekonomi dan politik, yang berlangsung sejak pengunduran diri Soeharto di tahun 1998 bisa diphami dalam kerangka perubahan peran pembangunan negara dan perubahan hubungan negara-kapital. Reformasi ekonomi dalam hal ini berkaitan erat dengan upaya menanggalkan peran negara sebagai pemilik modal dan investor. Melalui privatisasi peran tersebut diserahkan kepada pihak swasta yang akan mengelola kapital berdasarkan prinsip-prinsip pasar bebas. Tapi negara tetap menjalankan fungsi penting sebagai penyedia kerangka regulasi yang memungkinkan pasar bebas bekerja secara opitmal. Fungsi ini bekenaan dengan kebijakan-kebijakan semacam menjamin disiplin fiskal, mengurangi belanja publik, reformasi pajak, liberalisasi finansial, mendorong nilai tukar yang kompetitif, liberalisasi perdagangan, melancarkan investasi asing,

privatisasi perusahaan negara, deregulasi ekonomi, dan perlindungan terhadap *property rights.* Dalam bacaan Marxisme konvensional reformasi ekonomi di Indonesia adalah bagian dari proses diferensiasi peran negara dan pemilik modal sebagai kondisi yang tak terelakkan bagi sebuah kapitalisme yang lebih maju (*advanced*).

Di saat bersamaan reformasi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari upaya mengubah hubungan negara dan pemilik modal. Model hubungan yang personal dan arbiter yang selama ini dipraktikan tidak bisa dipertahankan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar bebas. Negara sudah tidak bisa lagi mengambil sikap yang menguntungkan pemilik modal tertentu berdasarkan kedekatan pribadi atau demi kepentingan gratifikasi, tapi harus berpihak pada performa yang diukur berdasarkan aspek-aspek seperti efisiensi dan daya kompetisi. Dalam hal ini reformasi politik yang berkaitan dengan isu-isu seperti pencipataan pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabilitas dan transparansi publik, pemberantasan korupsi dan penegakkan *rule of law* bisa dilihat sebagai bagian dari upaya menciptakan hubungan negara dan pemiliki modal yang obyektif, yang tidak menimbulkan distrosi pasar.

Selama ini reformasi ekonomi di Indonesia—yang sebagian besar mengambil jalan neoliberal—dianggap identik dengan menarik keluar negara dari wilayah ekonomi sembari menyerahkan proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang bermanfaat kepada mekanisme pasar. Sejalan dengan itu reformasi politik juga identik dengan upaya mempreteli kekuasaan negara yang menjadi syarat penting perwujudan kebebasan sipil yang diterima sebagai esensi demokrasi yang paling penting. Uraian di atas menunjukkan kesalahkaparahan anggapan tersebut. Pertama, negara, bahkan jika mengikuti model reformasi yang neoliberal sekalipun, tidak akan pernah keluar dari wilayah ekonomi, hanya beralih peran dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Mengatakan reformasi ekonomi sama artinya dengan menyudahi "intervensi ekonomi" negara memistifikasi peran negara yang sangat penting dalam pembangunan yang mengambil jalan kapitalistik. Kedua, pasar bebas bukan sebuah mekanisme alami yang "jatuh dari langit." Pasar bebas merupakan produk dan mencerminkan kerangka regulasi tertentu. Menganggap pasar sebagai kekuatan otonom karenanya mengabaikan pengaruh subyektif

negara—melalui mekanisme kebijakan. Ketiga, hal serupa berlaku untuk reformasi politik. Kebebasan sipil tidak hanya soal hak-hak natural yang melekat sejak lahir tapi juga menyangkut regulasi dan aturan yang memungkinkannya terwujud dan bertahan lama. Mengidentikkan reformasi politik dan pelucutan kekuatan negara—sebagai sumber kebijakan-kebijakan otoritatif—adalah sebuah kontradiksi.

Tegasnya, pasar bebas seperti halnya masyarakat bebas adalah soal kerangka regulasi yang diproduksi Negara. Sejak proses pembuatan sebuah regulasi tidak pernah bebas kepentingan, menganggap pasar bebas dan kebebasan sipil sebagai konsep dan praktik yang netral dan universal adalah sebuah kekeliruan. Pesan tulisan ini adalah: karena negara Orde Baru maupun negara baru pasca Soeharto adalah jenis negara yang selalu berpihak pada kapitalisme, maka pasar bebas dan masyarakat bebas yang diperjuangkan dalam sekitar sembilan tahun terakhir bisa terjebak dalam kepentingan akumulasi kapital dan memuliakan kelas pemilik modal. ****

Daftar Pustaka

Arndt, H.W and Hill, Hal. (1988). 'The Indonesian Economy: Structural Adjustment after the Oil Boom.' *Southeast Asian Affairs*: 106-19.

Bello, Walden. (1998). 'The End of the Asian Miracle.' *Inside Indonesia*, April-June, 7-10.

Block, Fred. (1977). 'The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State.' *Socialist Review* 7 (33): 6-28.

Block, Fred. (1987). *Revising State Theory: Essays in Politics and Postindustrialism*. Philadelphia: Temple University Press.

Habir, Manggi. (1994). 'Bank Soundness Requirements: A Commercial Bank Perspective.' R. H. McLeod (ed). *Indonesia Assessment 1994: Finance as a Key Sector in Indonesia's Development*. Canberra: RSPAS, ANU.

Haggard, Stephan. (2000).. *The Political Economy of the Asian Financial Crisis*. Washington, DC: Institute for International Economics.

Hiariej, Eric . (2003). The Historical Materialism and the Politics of the Fall of Soeharto. Canberra: Australian National University

Higgott, Richard. (2000). 'The International Relations of the Asian Economic Crisis: A Study in the Politics of Resentment.' Dalam R. Robison, M. Beeson, K. Jayasuriya dan K. Hyuk-Rae (editor). *Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis*. London: Routledge.

Hill, Hal. (2000). *The Indonesian Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hoogvelt, Ankie. (2001). *Globalization and the Postcolonial World: The New Political Economy of Development*. London: Palgrave.

Infobank, Oktober 1995

Infobank, April 1996

Infobank, Februari 1997

Johnson, Colin. (1998). 'Survey of Recent Developments.' *BIES* 34 (2): 3-60.

Lam, Lai Sing. (1991). 'Problems and Prospects of Oil in the Indonesian Political Economy.' Dalam S. Sadri (editor). *Oil and Economic Development*. Kuala Lumpur: Forum.

McLeod, Ross H. (1997). 'Postcript to the Survey of Recent Developments: On Causes and Cures for the Rupiah Crisis.' *BIES* 33 (3): 33-52.

Nasution, Anwar. (1992). 'The Years of Living Dangerously: The Impacts of Financial Sector Policy Reforms and Increasing Private Sector External Indebtedness in Indonesia, 1983-1992.' *Indonesian Quarterly* XX (4): 405-37.

Nasution, Anwar. (1999). 'The Financial Crisis in Indonesia.' Dalam S. Masuyama, D. Vandenbrink dan S. Y. Chi (editor). *East Asia's Financial System: Evolution and Crisis*. Tokyo: NRI & ISEAS.

Noerhadi, D. Cyril. (1994). 'The Role of the Indonesian Capital Market.' Dalam R.H. McLeod (editor). *Indonesia Assessment 1994: Finance as a Key Sector in Indonesia's Development*. Canberra: RSPAS, ANU.

Pangestu, Mari. (1989). 'Economic Policy Reforms in Indonesia.' *Indonesian Quarterly* XVII (3): 218-33.

Pangestu, Mari. (1996). *Economic Reform, Deregulation and Privatization: The Indonesian Experience.* Jakarta: CSIS.

Poulantzas, Nicos. (1972). 'The Problem of the Capitalist State.' Dalam R. Blackburn (editor). *Ideology in Social Science: Readings in Critical social Theory.* Glasgow: Fontana/Collins.

Robison, Richard. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital.* Sydney: Allen and Unwin.

Robison, Richard. (1987). 'After the Gold Rush: The Politics of Economic Restructuring in Indonesia in the 1980s.' Dalam R. Robison, K. Hewison dan R. Higgot (editor). *Southeast Asia in the 1980s: The Politics of Economic Crisis.* Sydney: Allen & Unwin.

Robison, Richard. (1992). 'Industrialization and the Economic and Political Development of Capital: The Case of Indonesia.' Dalam R. McVey (editor). *Southeast Asian Capitalists.* Ithaca: SEAP(Southeast Asian Program).

Robison, Richard. (1997). 'Politics and Markets in Indonesia's Post-oil Era.' Dalam G. Rodan, K. Hewison dan R. Robison (editor). *The Political Economy of South-East Asia: An Introduction.* Melbourne: Oxford University Press.

Robison, Richard. (2001). 'Indonesia: Crisis, Oligarchy and Reform.' G. Rodan, K. Hewison dan R. Robison (editor). *The Political Economy of Southeast Asia: Conflicts, Crises and Change.* Melbourne: Oxford University Press.

Robison, Richard dan Rosser, Andrew. (1998). Contesting Reform: Indonesia's New Order and the IMF. *World Development* 26 (8): 1593-609.

Robison, Richard dan Rosser, Andrew. (2000). 'Surviving the Meltdown: Liberal Reform and Political Oligarchy in Indonesia.' Dalam R. Robison, M. Beeson, K. Jayasuriya dan K. Hyuk-Rae (editor). *Politics and markets in the Wake of the Asian Crisis.* London: Routledge.

Rosser, Andrew. (2002). *The Politics of Economic Liberalisation In Indonesia: State, Market and Power.* Richmond: Curzon.

Schwarz, Adam. (1999). *A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability*. Sydney: Allen and Unwin.

Simandjuntak, Djisman. (1984). 'The Expansion of the Role of the Private Sector during Pelita IV: Between Urgency and Reluctance.' *Indonesian Quarterly* XII (3): 319-27.

Sjahrir. (1990). 'The Indonesian Deregulation Policy Process: Problems, Constraints and Prospects.' Dalam J. Langford dan K. L. Brownsey (editor). *Economic Policy Making in the Asia Pacific Region*. Nova Scotia: Institute for Research on Public Policy.

Sjahrir dengan Brown, Colin. (1992). 'Indonesian Financial and Trade Policy Deregulation: Reform and Response.' Dalam A. MacIntyre dan K. Jayasuriya (editor). *The Dynamics of Economic Policy Reform in South-east Asia and the South-west Pacific*. Singapore: Oxfrod University Press.

Soesastro, Hadi dan Basri, M. Chatib. (1998). 'Survey of Recent Developments.' *BIES* 34 (1): 3-54.

Taubert, Armin. (1991). 'Liberalism under Pressure in Indonesia.' *Southeast Asian Affairs*: 121-38.

Thee, Kian Wie. (1998). 'Indonesia's Economic Performance under the New Order.' *Indonesia Quarterly* XXVI (2): 123-42.

Tornquist, Olle. (1990). 'Rent Capitalism, State, and Democracy: A Theoretical Proposition.' Dalam A. Budiman (editor). *State and Civil Society in Indonesia*. Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.

van Klinken, Gerry. (1994). Economy in the Limelight. *Inside Indonesia*, June, 2-4.

Wade, Robert. (1998). The Asian Debt-and-development Crisis of 1997-?: Causes and Consequences. *World Development* 26 (8): 1535-53.

Winters, Jeffrey A. (2000). 'The Financial Crisis in Southeast Asia.' Dalam R. Robison, M. Beeson, K. Jayasuriya dan K. Hyuk-Rae (editor). *Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis*. London: Routledge.